

ABSTRAK

Outsourcing merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah pengusaha menjalankan usaha di tengah krisis ekonomi dan untuk mengatasi banyaknya masalah pengangguran yang disebabkan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Praktek kerja dengan sistem kontrak (outsourcing) bukanlah hal baru dalam dunia kerja di Indonesia. Sejak pengesahan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan praktek kontrak kerja (outsourcing) semakin marak di Indonesia. Lahirnya Undang Undang ini memberikan peluang kepada perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi fleksibilitas pasar tenaga kerja yang memungkinkan terjadinya praktek kontrak (outsourcing) tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI PT. KUBOTA INDONESIA.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak kerja di PT. Kubota Indonesia, untuk mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban PT. Kubota Indonesia dan perusahaan outsourcing. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing beserta solusinya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kontrak kerja di PT. Kubota Indonesia, untuk mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban PT. Kubota Indonesia dan perusahaan outsourcing, dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing beserta solusinya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis dengan jenis data berdasarkan pada data Primer dan data Sekunder yang berdasarkan hasil Wawancara serta kajian Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian kerja PT. Kubota Indonesia dengan outsourcing terdapat pada surat perjanjian antar pihak yang disepakati dan diatur pula dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yakni pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 59 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.11 tahun 2019 tentang alih dayayakni pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Hak dan Kewajiban pihak PT. Kubota Indonesia dan Perusahaan Outsourcingtelah dipenuhi oleh PT. Kubota Indonesia yakni termuat dalam isi perjanjian MOU antar pihak.Selama proses pembuatan atau pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Kubota Indonesia dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing tidak ada kendala atau hambatan yang terjadi.

Kata kunci : Perjanjian Kerja, Outsourcing, PT. Kubota Indonesia

ABSTRACT

Outsourcing is a government step to make it easier for entrepreneurs to do business in the midst of an economic crisis and to overcome the many unemployment problems caused by limited employment opportunities in the country. Outsourcing practices are not new to the world of work in Indonesia. Since the ratification of Law No. 13 of 2003 concerning labor, the practice of contract work (outsourcing) is increasingly prevalent in Indonesia. The enactment of this law provides an opportunity for companies in Indonesia to adopt the flexibility of the labor market which allows for the practice of labor outsourcing. Based on this background, the writer picked up the title TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI PT. KUBOTA INDONESIA.

The formulation of the problem in writing this thesis is to determine the implementation of the work contract agreement at PT. Kubota Indonesia, to find out what the rights and obligations of PT. Kubota Indonesia and an outsourcing company, to find out what are the obstacles in implementing an outsourcing work agreement and their solutions. The purpose of this study is to knowing the implementation of the work contract agreement in PT. KUBOTA INDONESIA, to know the rights and obligations of PT. KUBOTA INDONESIA and outsourcing company, and to find out what are the obstacle in the implemenatiton of an outsourcing work agreement and their solutions. The research method in writing this thesis uses the juridical empirical approach and descriptive analytical research specifications with the type of data based on primary data and secondary data based on the results of interviews and studies of laws and regulations related to the object of research. So as to produce a qualitative data analysis method.

Based on the results of this study the authors concluded that the procedure for implementing the work agreement of PT. Kubota Indonesia with outsourcing is contained in a letter of agreement between the parties that was agreed upon and also regulated in Law No. 13 of 2003, namely in Article 50 to Article 59 and Regulation of the Minister of Manpower No.11 of 2019 concerning outsourcing, namely in Article 19 to Article 21. Rights and Obligations of PT. Kubota Indonesia and the Outsourcing Company have been fulfilled by PT. Kubota Indonesia is contained in the contents of the MOU agreement between the parties. During the process of making or implementing a work agreement between PT. Kubota Indonesia with an outsourcing service provider company, there are no obstacles or obstacles that occur.

Keywords: Work Agreement, Outsourcing, PT. Kubota Indonesia